

PERANAN PT DALAM PEMBINAAN SIKAP ILMIAH MAHASISWA



Oman Sukmana

The role of education become more important and urgent to educate people in order to participate in the process of nation building. Because the success of developing country is not only based on the natural resources, but also it is based on the human resources. There are many countries having a number of natural resources, yet they still become under developing countries. In kontras, some countries which have few natural resources can develop themselves to modern ones because they have qualified human resources. As a result, education is the best way to qualify the human resources.

Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dijelaskan bahwa tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 akan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan Pembangunan Nasional berencana secara bertahap yang selanjutnya dijabarkan melalui serangkaian pelaksanaan Pembangunan Lima Tahunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh faktor kekayaan alam (natural Resources), akan tetapi juga oleh faktor sumber daya manusianya (Human Resources). Sebab kenyataan membuktikan bahwa ada negara-negara yang mempunyai sumberdaya alam sangat melimpah, akan tetapi ternyata masih tetap menjadi negara miskin (terbelakang/berkembang). Hal ini disebabkan karena masih belum mampu memanfaatkan sumberdaya alam tersebut, mengingat masih rendahnya kualitas sumberdaya manusianya. Sementara itu, ada negara-negara yang miskin sumber daya alamnya akan tetapi karena memiliki kualitas sumberdaya manusia yang baik maka bisa menjadi negara yang maju dan makmur. Dengan demikian semakin disadari bahwa Sumberdaya manusia (Human Resources) memang sangat penting dan ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Sejak awal pemerintah Indonesia sudah menyadari akan pentingnya kualitas sumberdaya manusia tersebut. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan dilaksanakannya Sistem Pendidikan Nasional (Formal). Sebab disadari bahwa kualitas sumberdaya manusia bisa ditingkatkan apabila dilaksanakannya Pendidikan Nasional, khususnya pendidikan yang bersifat formal. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menegaskan dengan jelas bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia untuk mewujudkan manusia-manusia pembangunan (TAP MPR No.II/MPR/1988).

Berkaitan dengan upaya melahirkan manusia-manusia pembangunan yang berkualitas tersebut, pemerintah menaruh harapan yang sangat besar terhadap Perguruan Tinggi sebagai institusi tertinggi dalam Sistem Pendidikan Nasional. Dari kalangan Perguruan tinggi ini-

lah diharapkan akan lahir kader-kader insan akademis profesional yang berkualitas pembangunan, yang sanggup dan mampu sebagai pelaksana pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini selaras dan merupakan tujuan dari Pendidikan Tinggi yaitu; menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Deskripsi tersebut diatas membawa kita pada suatu pemikiran (kesimpulan) bahwa Perguruan Tinggi senantiasa dituntut dan berkewajiban untuk mewujudkan serta meningkatkan insan-insan akademis (bersikap ilmiah) yang profesional sebagai sumber daya manusia pembangunan berkualitas. Tentu saja dengan melaksanakan fungsi Perguruan Tinggi melalui Tridharma Perguruan Tinggi yaitu; Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian serta Pengabdian Pada Masyarakat.

Masalah Yang Dihadapi

Memang tidaklah terlalu berlebihan kalau dikatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat menaruh harapan dan perhatian yang besar terhadap dunia Pendidikan Tinggi. Sudah menjadi pembicaraan sehari-hari, bahwa pendidikan tinggi senantiasa dipertalikan dengan pendidikan sarjana, sarjana yang 'capable' yang memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat.

Kebijakan Pemerintah dalam Sistem Pendidikan Nasional khususnya pendidikan tinggi dewasa ini ternyata telah mampu menciptakan iklim yang kondusif. Hal ini terbukti bahwa lembaga Pendidikan Tinggi baik negeri maupun swasta secara kuantitas sudah cukup memadai bahkan sudah semakin menjamur. Kita dapat menjumpai lembaga (institusi) Perguruan Tinggi, bukan saja hanya di kota-kota besar (ibu kota Propinsi) akan tetapi juga dapat dijumpai atau ditemukan di kota-kota sedang, bahkan di kota kecil sekalipun. Konsekwensi logis dari akibat menjamurnya lembaga/ins-

titusi pendidikan tinggi tersebut adalah meningkatnya pula jumlah lulusanya (para sarjana). Meskipun kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, maka prosentaseya terhitung masih belum seimbang.

Dilain pihak, motivasi para orang tua untuk mendorong anaknya melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi serta keinginan para siswa tamatan SMTA untuk memasuki Perguruan Tinggi, dirasakan sudah cukup baik dan merupakan kondisi yang kondusif dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia berkualitas. Kondisi seperti ini harus dipertahankan dan bahkan terus ditingkatkan.

Akan tetapi iklim kondusif tersebut diatas bukanlah tidak menimbulkan masalah, sebab kenyataannya seiring dengan meningkatnya jumlah lulusan Perguruan Tinggi, ternyata kurang diikuti dengan peningkatan kualitasnya. Hal ini terbukti dengan munculnya sorotan dan keluhan dari masyarakat dan para pemakai lulusan tersebut. Mereka pada umumnya menilai bahwa kualitas lulusan Perguruan Tinggi saat ini masih rendah dan bahkan cenderung menurun. Pernyataan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa:

- Banyak dunia kerja yang mempermasalahkan rendahnya relevansi keahlian atau profesionalitas para sarjana.
- Semakin terasanya kepincangan antara output pendidikan tinggi dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga mengakibatkan banyaknya sarjana menganggur.

Penilaian masyarakat atau pemakai lulusan pendidikan tinggi tentang menurunnya kualitas lulusan, tampaknya tidak jauh berbeda dengan komentar para ahli pendidikan. Hanya saja, para ahli pendidikan tersebut berbicara lebih ilmiah dan hati-hati. Misalnya HAR.Tilaar, dengan data yang diperoleh berpendapat bahwa untuk menilai kualitas pendidikan harus menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria tersebut adalah :

- Kriteria Akademik, yaitu pendidikan mampu menghasilkan standar akademik yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
- Kriteria Regio-Moral, yaitu pendidikan harus mampu mendidik manusia Indonesia yang berkepribadian luhur, bermoral dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- Kriteria Ketenagakerjaan, yaitu pendidikan mampu menghasilkan tenaga pembangunan yang terampil dan jumlah yang memadai untuk berbagai sektor pembangunan (HAR. Tilaar; Makalah; 1989).

Dari ketiga kriteria tersebut, terdapat kenyataan sebagai berikut:

- Kriteria Akademik; (a) Kualitas akademik pendidikan menunjukkan profil yang sangat majemuk. Belum terjadi pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan serta wilayahnya. (b) Daya serap input (siswa/mahasiswa) masih rendah, yang ditunjukkan oleh hasil EBTANAS, UMPTN atau hasil evaluasi akademik lainnya.

- Kriteria Religio-Moral;

Mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan dalam rangka memberikan perhatian dan kesempatan yang seimbang bagi pembinaan akademik, moral-religi. Nilai-nilai luhur seperti sopan santun, tanggung jawab pribadi dan sosial sebagai kegiatan yang menyeluruh serta iman, perlu dikembangkan.

- Kriteria Ketenagakerjaan;

Semakin melebarnya kesejangan antara sejumlah output perguruan tinggi/pendidikan tinggi dengan lapangan pekerjaan. Output perguruan tinggi semakin bertambah, sementara lapangan kerja dalam pertumbuhannya sangat lambat bahkan cenderung berkurang.

Dengan melihat tiga kriteria penilaian terhadap dunia pendidikan tersebut diatas, kita dapat melihat peta pendidikan/perguruan tinggi yang ternyata masih jauh dari kualitas pendidikan yang diharapkan, tentu saja banyak faktor yang mempengaruhinya.

Dunkin dan Biddle, pakar pendidikan dari Amerika Serikat menyebutkan tiga variabel yang mempengaruhi kualitas lulusan pendidikan, yaitu :

- Variabel Pertama, yang meliputi : (a) Latar belakang pengajar (b) Pengalaman pendidikan pengajar (c) Sifat pengajar.
- Variabel kriteria, meliputi : (a) Latar belakang anak didik (mitra didik) (b) Sifat

anak didik (mitra didik) (c) Lingkungan sekolah/perguruan tinggi dan masyarakat (d) Suasana kelas.

- Variabel proses, yang meliputi : (a) Tingkah laku pengajar di dalam kelas (b) Tingkah laku anak didik/mitra didik di dalam kelas (c) Perubahan tingkah laku anak didik/mitra didik hasil interaksi 3.a dan 3.b.

Meskipun kriteria penilaian masyarakat tentang menurunnya lulusan pendidikan tinggi tersebut tidak seluruhnya benar, akan tetapi hendaknya tetap mendapat perhatian. Apapun yang ada dan beredar dalam masyarakat merupakan kenyataan yang harus mendapat perhatian, karena bagaimanapun juga masyarakatlah yang akan menggunakan output pendidikan tinggi. Yang jelas merupakan kewajiban pihak Perguruan Tinggi khususnya dan berbagai pihak yang terkait pada umumnya untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas lulusannya melalui peningkatan pembinaan terhadap mahasiswanya, khususnya dalam rangka pembentukan sikap ilmiah dan sikap professional.

Peranan Perguruan Tinggi

Sebagaimana tercantum dalam GBHN, tujuan proses belajar-mengajar di Perguruan Tinggi adalah mengembangkan dan mengarahkan serta membentuk mahasiswa yang berkualitas sebagai manusia pembangunan dan mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia. Sejalan dengan itu, Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan atau berwawasan nasional.

Sementara itu Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah, mempunyai tujuan sebagai berikut :

- Menyiapkan peserta didik menjadi anggota

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu, pengetahuan, teknologi dan kesenian.

- Mengembangkan dan mengupayakan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Tujuan pendidikan tinggi tersebut oleh lembaga pendidikan tinggi dijabarkan menjadi tujuan per-program studi, dimana ada Perguruan non-gelar (diploma) dan program Strata-I (S-1).

- Program non-gelar (diploma) menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut : (a) Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi. (b) Bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan perkembangan IPTEK serta masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan keahliannya. (c) Memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuannya dan keterampilannya ke dalam kegiatan produktif dan pelayanan dalam masyarakat.

- Program Strata-I (S-1) menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi seperti program non-gelar dengan ditambah sebagai berikut : (a) Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bertindak dan bersikap sebagai ilmuwan. (b) Menguasai pengetahuan dan metodologi bidang keahliannya, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara-cara penyelesaian masalah sesuai dengan keahliannya.

Dari tujuan-tujuan tersebut diatas, secara spesifik dapat digolongkan menjadi 4 aspek, yaitu :

- Aspek Religio-Moral
Lulusan Perguruan tinggi harus memiliki jiwa Pancasila dan berkepribadian yang luhur.
- Aspek Kognitif
Lulusan perguruan tinggi harus memiliki keaahlian dan keterampilan sesuai dengan

bidang keahliannya.

■ **Aspek Afektif**

Lulusan perguruan tinggi harus memiliki sikap ilmiah dan tanggung jawab/tanggap terhadap permasalahan yang terjadi baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan kerjanya.

■ **Aspek Psikomotorik**

Lulusan perguruan tinggi mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan bidang keahlian dan mampu menyelesaikan masalah yang timbul di lingkungan kerjanya maupun di lingkungan masyarakat.

Masyarakat kita yaang kini sedang berada dalam taraf transisi dan menuju ke arah masyarakat yang berkembang sangat membutuhkan banyak sarjana yang betul-betul ekspert dalam berbagai bidang keahlian. Mungkin terlalu fanatik kalau kita mengungkapkan bahwa pengembangan dan pembangunan masyarakat sangat tergantung pada adanya dan banyaknya sarjana yang kita miliki. Dan pendapat tersebut memang telah menjadi kenyataan terutama pada negara-negara yang telah maju.

Dengan kata lain, peranan para sarjana merupakan faktor yang sangat menentukan kemajuan bangsa atau setidaknya-tidaknya mereka memegang andil yang sangat besar nilainya baik dalam bidang bahasa dan sastra, ilmu pengetahuan sosial, teknologi, pendidikan dan sebagainya.

Adapun sarjana-sarjana yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah sarjana-sarjana yang memiliki kualifikasi yang secara garis besar dapat dikategorikan sebagai berikut :

■ **Memiliki pengetahuan dan kecakapan profesional.**

Sarjana demikian adalah yang betul-betul cakap dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Profesional artinya memiliki keahlian yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan keahliannya. Istilah yang paling populer bagi sarjana yang dalam kategori ini adalah "Sarjana yang ilmiah".

■ **Kecakapan Memimpin.**

Artinya cakap melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemimpinan di dalam masyarakat. Kepemimpinan biasanya ditandai dengan

kemampuan membuat perencanaan, melaksanakan kegiatan pelaksanaan, kegiatan kontrol dan penilaian atas hasil kerja. Tentu saja untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan banyak persyaratan lainnya.

■ **Kecakapan dalam bidang penelitian.**

Seorang sarjana dituntut juga untuk mampu melaksanakan penelitian ilmiah. Penelitian mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, menemukan berbagai kebenaran yang objektif, merangsang para 'scientist' lainnya untuk turut serta membahas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian mendorong kearah kemajuan masyarakat yang lebih baik.

■ **Pengabdian Ilmu kepada masyarakat.**

Kesarjanaan yang diperoleh di perguruan tinggi sesungguhnya bukan untuk kepentingan diri sarjana itu sendiri. Pada dasarnya ilmu yang dimiliki bermakna apabila diabdikan, dimanfaatkan dan diterapkan guna kepentingan masyarakat luas. Dedikasi adalah persyaratan mutlak bagi tiap sarjana Indonesia.

■ **Berkepribadian yang baik.**

Seorang sarjana tidak cukup hanya memenuhi kualifikasi tersebut diatas saja, akan tetapi perlu memiliki sikap kesarjanaan dan memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. Secara umum setiap orang Indonesia harus memiliki kepribadian Pancasila sejati.

■ **Berjiwa aktif, berinisiatif, dan kreatif.**

Jiwa yang melempem, mandeg, hanya mengekor apa yang dikomandokan dan samia sekali tidak mencapai usaha-usaha yang kreatif tentulah tidak diharapkan oleh masyarakat.

Tuntutan-tuntutan kualifikasi tersebut sebenarnya dapat diwujudkan apabila perguruan tinggi mampu melaksanakan fungsinya dengan baik yakni apa yang disebut Tridharma Perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian seerta pengabdian pada masyarakat.

Pendidikan dan Pengajaran,

Fungsi pertama perguruan tinggi adalah fungsi pendidikan dan pengajaran. Pendidikan

dan pengajaran ini diwujudkan dalam proses kegiatan belajar-mengajar (PBM), baik proses belajar-mengajar di kelas (classroom teaching) maupun proses belajar mengajar di lapangan (field teaching). Tujuan pendidikan dan pengajaran ini adalah khususnya dalam rangka memberikan bekal pengetahuan teoritis kepada para mahasiswa (aspek kognitif), diharapkan wawasan teoritis mahasiswa semakin meningkat dan semakin luas.

Dalam hal ini, DR. Karl Heinz Flaching seorang guru besar pada "Interdisciplinary Centre for University; University of Hamburg" (BP-7 Pusat; 1980:1), menegaskan bahwa seorang pendidik (dosen) mempunyai 3 fungsi sosio-kultural dalam bidang pendidikan, yaitu :

- Fungsi sebagai komunikator
Yaitu menyediakan sumber informasi, menyaring informasi, mengevaluasi informasi sehingga kelompok ini memahami isi informasi tersebut. Akibatnya secara langsung seorang pendidik mempengaruhi pendapat, pandangan dan sikap seseorang.
- Fungsi sebagai inovator
Seleksi informasi bukan terutama didasarkan pada nilai informasi itu bagi generasi yang lampau, tetapi seleksi terutama didasarkan pada kemungkinan relevansi dan nilainya untuk generasi yang tengah tumbuh. Dalam hal ini seorang pendidik telah memasukkan aspek masa depan ketika menyeleksi informasi. Sebagai inovator seorang pendidik sebaiknya berusaha menempatkan dirinya cukup jauh dari kedua sistem normatif, yaitu ; yang berorientasi ke masa depan dan yang menurut relevansi output pendidik, sehingga ia dapat merupakan faktor korelasi atau sumber pengaruh dalam jalannya perubahan sosial.
- Fungsi sebagai Emansipator
Membantu membawakan perorangan atau kelompok orang kepada tingkat perkembangan kepribadian (segi pengetahuan, keterampilan dan sikap) yang lebih tinggi dari keadaan sekarang, sehingga memungkinkan mereka mampu berdiri sendiri. Di dalam praktek mengajar, seorang pengajar tidak hanya memperhatikan dan menitik beratkan pada isi materi pelajaran, melainkan juga

menitik beratkan kepada peserta didiknya atau mungkin juga ia berhasil memelihara keseimbangan antara ketiga orientasi tersebut.

Penelitian

Upaya peningkatan pembinaan mahasiswa dalam rangka pembentukan sikap ilmiah dan sikap profesional di perguruan tinggi, dapat pula dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu proses penelaahan, pengamatan, pengkajian dan penyelidikan tentang fenomena yang ada di sekitarnya untuk selanjutnya dibahas secara konseptual teoritis berdasarkan disiplin ilmu masing-masing.

Dalam pelaksanaannya kegiatan penelitian sebagai salah satu unsur pelaksana akademik, memiliki kedudukan yang sangat penting. Lembaga penelitian di perguruan tinggi mungkin berupa Pusat Penelitian. Pusat Penelitian dalam pasal 41 ayat 1 PP No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan sebagai berikut: "Pusat Penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Pengabdian Pada Masyarakat

Unsur ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat. Bagi mahasiswa kegiatan ini akan sangat bermanfaat, karena secara langsung mahasiswa akan dapat belajar bagaimana cara mengamalkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Biasanya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berupa KKN, bakti sosial, dan sebagainya.

Menurut rumusan dalam buku "Kebijakan Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat oleh PT", Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, bahwa pengertian pengabdian pada masyarakat adalah penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni langsung pada masyarakat secara melembaga melalui metodologi ilmiah sebagai tanggung

jawab luhur perguruan tinggi dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Jadi jelas bahwa peranan Perguruan tinggi dalam meningkatkan sikap profesionalitas mahasiswa sangat penting melalui optimalisasi pelaksanaan fungsi Perguruan Tinggi yaitu Tridharma Perguruan Tinggi tersebut.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi akademik itu, maka Perguruan Tinggi memberikan kondisi yang memungkinkan para sivitas akademika khususnya mahasiswa, dapat melaksanakan tugas akademiknya dengan baik. Fungsi-fungsi akademik ini dapat berupa kegiatan yang bersifat kurikuler dan pembinaan yang bersifat ekstra-kurikuler.

Daftar Pustaka

- Barbara H. Aiken & Linda H. Aiken; *Evaluation Studies*, Sage Publication, Inc, Beverly Hills, California, 1985.
- Dunkin, MJ, Bidle; *The Study Of Teaching*, Holf Rinehart and Winston, New York, 1974.
- Oemar Demalik; *Metode Belajar dan Kesulitan Belajar*, Tarsito, Bandung, 1985.
- Tilaar, HAR., *Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi Menyongsong Abad XXI*, Makalah, 1989.
- UU RI No. 2/1989; *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Sekretariat Kabinet RI, Jakarta.
- _____, *Teknik Penyajian Materi*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1980.